

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara keseluruhan tata kelola keuangan Desa Iker Iker Geger telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mendukung keberhasilan pemerintah Desa Iker Iker Geger dalam melaksanakan pembangunan.

Pemerintah Desa Iker Iker Geger telah menerapkan akuntabilitas dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan melalui pembuatan dan penyampaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang terstruktur dengan jelas. Proses ini memastikan dana desa dikelola secara transparan dan digunakan sesuai peruntukannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa tercermin dari penyediaan papan informasi di Balai Desa dan dusun-dusun. Papan ini memuat rincian anggaran dan realisasi keuangan, memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana secara langsung. Hal ini mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Peran aktif masyarakat sangat berkontribusi pada keberhasilan pembangunan. Partisipasi mereka terlihat dari pengajuan gagasan dalam forum musyawarah desa dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan. Proyek seperti Jalan Usaha

Tani dan peninggian jalan berhasil direalisasikan dengan antusiasme dan pengawasan masyarakat yang tinggi.

5.2 Rekomendasi

Pemerintah Desa Iker Iker Geger diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan menyediakan informasi anggaran secara daring melalui *website* atau media sosial sehingga dapat memperluas jangkauan informasi dan mempermudah masyarakat mengakses data secara *real-time*.

Penelitian mendatang dapat berfokus pada aspek spesifik seperti efektivitas teknologi informasi dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan desa atau dampak partisipasi masyarakat terhadap prioritas program pembangunan yang dihasilkan.